

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kurikulum Merdeka

1. Pengertian Implementasi dan Kurikulum

Istilah implementasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *implementation* yang berarti pelaksanaan, penerapan, atau perwujudan dari suatu rancangan menjadi tindakan nyata. Dalam kajian kebijakan pendidikan, implementasi dipahami sebagai suatu proses transformasi dari konsep, program, atau kebijakan ke dalam tindakan praktis yang menyentuh aspek teknis, sosial, maupun budaya dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut (Sugiyono & Lestari 2021, hlm. 45), implementasi tidak hanya dimaknai sebagai sekadar pelaksanaan, melainkan juga melibatkan kemampuan adaptasi, interpretasi, serta kreativitas guru dan pemangku kepentingan pendidikan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, implementasi adalah jembatan yang menghubungkan antara idealitas kurikulum dengan realitas praktik pembelajaran di kelas.

Sementara itu, istilah kurikulum memiliki cakupan makna yang lebih luas. Secara klasik, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. (Adzim et al., 2024, hlm. 11) Kemendikbud menegaskan bahwa kurikulum bukan hanya daftar mata pelajaran, melainkan seperangkat pengalaman belajar yang secara sistematis dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi intelektual, emosional, spiritual, maupun keterampilan sosialnya. Artinya, kurikulum tidak hanya berfokus pada ranah kognitif semata, tetapi juga membentuk sikap, karakter, serta kompetensi yang sesuai dengan tantangan abad ke-21.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, pengertian kurikulum semakin ditekankan pada fleksibilitas dan keberpihakan pada peserta didik. Kurikulum ini memberi ruang lebih luas kepada guru untuk melakukan diferensiasi

pembelajaran sesuai kebutuhan, minat, dan bakat siswa (Adzim et al., 2024, hlm. 11). Implementasi Kurikulum Merdeka menuntut guru agar tidak hanya menjadi *transmitter of knowledge*, melainkan juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang membantu siswa menemukan serta mengembangkan potensinya.

Lebih jauh, implementasi kurikulum bukan sekadar menjalankan apa yang tertulis dalam dokumen kurikulum, tetapi juga menuntut penyesuaian dengan konteks sosial-budaya sekolah. (Napitupulu & Nasution 2022, hlm. 260) menjelaskan bahwa kurikulum harus bersifat dinamis dan mampu merespons perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, guru sebagai pelaksana terdepan memegang peran sentral untuk menafsirkan tujuan kurikulum menjadi strategi konkret yang relevan dengan kondisi peserta didik.

Dengan demikian, implementasi kurikulum dapat dimaknai sebagai proses penerjemahan ide, rancangan, dan dokumen kurikulum menjadi aktivitas pembelajaran nyata yang berdampak pada perkembangan siswa, baik pada ranah pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dalam praktiknya, implementasi memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga orang tua, agar tercapai sinkronisasi antara visi kurikulum dengan kebutuhan pembelajaran di lapangan.

Pada titik ini, jelas bahwa implementasi dan kurikulum tidak bisa dipisahkan. Kurikulum menyediakan kerangka konseptual, sementara implementasi menjadi mekanisme yang memastikan kerangka tersebut berjalan dan memberi makna nyata dalam proses pendidikan. (Sugiyono & Lestari 2021, hlm. 45) Hubungan keduanya ibarat rancangan arsitektur dan bangunan yang diwujudkan: tanpa implementasi, kurikulum hanya berhenti sebagai dokumen; dan tanpa kurikulum, implementasi tidak memiliki arah.

Akhirnya, pemahaman yang komprehensif tentang pengertian implementasi dan kurikulum menjadi landasan penting dalam melihat bagaimana Kurikulum Merdeka dapat dijalankan di sekolah, khususnya dalam pembelajaran PAI, untuk menumbuhkan sikap moderat siswa. Dengan

definisi yang jelas, diharapkan implementasi kurikulum tidak lagi bersifat formalitas, melainkan mampu menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter bangsa.

2. Landasan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka dibangun di atas berbagai landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, kurikulum ini mengacu pada gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang “pendidikan sebagai tuntunan hidup anak secara merdeka” yang menekankan keseimbangan antara budi pekerti, pengetahuan, dan keterampilan (Dewantara, 2013). Prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman.

Secara psikologis, Kurikulum Merdeka mempertimbangkan teori perkembangan kognitif, sosial, dan emosional peserta didik. Vygotsky (1978) dalam teorinya tentang *Zone of Proximal Development* menekankan pentingnya dukungan guru dalam membantu siswa berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Hal ini tercermin dalam prinsip diferensiasi pembelajaran Kurikulum Merdeka.

Secara sosiologis, kurikulum ini berlandaskan pada realitas sosial Indonesia yang majemuk. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk membentuk generasi yang toleran, inklusif, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Inilah yang menjadikan Kurikulum Merdeka relevan untuk menanamkan sikap moderat pada peserta didik.

Secara yuridis, keberlakuan Kurikulum Merdeka memiliki legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur tentang pedoman penerapan Kurikulum Merdeka. Landasan hukum ini memberikan kepastian bahwa kurikulum bukan sekadar kebijakan sementara, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional dalam bidang pendidikan.

Dengan demikian, landasan Kurikulum Merdeka menegaskan bahwa ia bukan sekadar dokumen teknis, melainkan sebuah paradigma pendidikan

yang berakar pada nilai-nilai filosofis bangsa, didukung teori ilmiah, berorientasi pada kebutuhan sosial, serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat

3. Ruang Lingkup dan Tujuan Kurikulum Merdeka

Ruang lingkup Kurikulum Merdeka mencakup berbagai aspek pendidikan mulai dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, hingga asesmen. Secara umum, ruang lingkungannya meliputi:

- a. Struktur Kurikulum: lebih fleksibel, tidak kaku seperti kurikulum sebelumnya, dengan fokus pada esensi materi.
- b. Capaian Pembelajaran (CP): menggantikan Kompetensi Dasar (KD), lebih ringkas dan terintegrasi dengan profil Pelajar Pancasila.
- c. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5): kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk memperkuat karakter dan kompetensi abad 21.
- d. Pembelajaran Diferensiasi: menyesuaikan strategi, konten, dan asesmen dengan kebutuhan serta minat peserta didik.

Tujuan utama Kurikulum Merdeka adalah:

- a. Mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi dasar sebagai pondasi pembelajaran sepanjang hayat.
- b. Membentuk Profil Pelajar Pancasila yang beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
- c. Membebaskan guru dan sekolah dari beban administratif yang kaku, sehingga lebih fokus pada kualitas pembelajaran (Kemdikbudristek, 2022).

Tujuan tersebut sangat relevan dengan pembentukan sikap moderat siswa, karena menekankan pada nilai keberagaman, gotong royong, serta kemampuan berpikir kritis yang menjadi fondasi moderasi beragama.

4. Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan strategi yang terencana dan berkesinambungan. Beberapa strategi kunci antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas Guru melalui pelatihan, komunitas belajar, serta pendampingan implementasi. Guru tidak hanya dituntut memahami substansi kurikulum, tetapi juga keterampilan pedagogis diferensiatif.
- b. Pemanfaatan Media Pembelajaran Kontekstual, termasuk Lembar Kerja Siswa (LKS), proyek berbasis lingkungan, dan praktik keseharian yang relevan dengan kehidupan siswa.
- c. Pembiasaan Karakter, misalnya membiasakan siswa berdoa bersama, menghargai perbedaan pendapat, serta bekerja sama lintas kelompok.
- d. Reward dan Punishment yang bersifat mendidik, sebagai strategi penguatan positif dan koreksi terhadap perilaku yang tidak sesuai nilai moderasi.
- e. Evaluasi Berbasis Asesmen Formatif, yang tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sosial.

Strategi ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka bukanlah upaya instan, melainkan proses gradual yang membutuhkan inovasi, kolaborasi, dan refleksi berkelanjutan.

5. Tantangan dan Solusi Implementasi Kurikulum Merdeka

Meski memiliki banyak keunggulan, implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. Kesiapan Guru: tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep pembelajaran diferensiasi.
- b. Keterbatasan Sarana: sekolah di daerah tertentu belum memiliki akses teknologi dan sumber belajar yang memadai.
- c. Budaya Pembelajaran Tradisional: sebagian siswa dan orang tua masih terbiasa dengan sistem pembelajaran lama yang berorientasi ujian.
- d. Beban Administrasi: meskipun sudah disederhanakan, guru tetap menghadapi tuntutan pelaporan dan asesmen yang kompleks.

Adapun solusi yang ditawarkan meliputi:

- a. Penguatan program Merdeka Belajar melalui pendampingan intensif.

- b. Pemberian otonomi lebih luas kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lokal.
- c. Kolaborasi dengan masyarakat dan orang tua untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek.
- d. Pengembangan sumber belajar sederhana dan kontekstual, meskipun tanpa proyektor atau fasilitas canggih.

Dengan solusi tersebut, implementasi Kurikulum Merdeka dapat lebih realistis dan inklusif, sesuai dengan kondisi sekolah di berbagai daerah.

B. Sikap Moderat

1. Pengertian Sikap Moderat

Sikap moderat merujuk pada kemampuan individu untuk menempatkan diri di tengah, menghindari ekstremisme, serta menjunjung tinggi keseimbangan dalam berpikir dan bertindak. Dalam konteks pendidikan agama, sikap moderat berarti mengedepankan prinsip toleransi, keterbukaan, serta penghargaan terhadap keberagaman (Nouval, 2022).

Sikap moderat berasal dari kata *moderatio* yang berarti kesederhanaan, keseimbangan, dan menghindari sikap ekstrem. Dalam konteks pendidikan agama, sikap moderat dimaknai sebagai kemampuan untuk memposisikan diri secara adil, menghargai perbedaan, dan menjauhi perilaku radikal maupun liberal yang berlebihan (Rahmah, 2021). Sikap ini sejalan dengan prinsip Islam ummatan wasathan (umat pertengahan) yang menekankan keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal.

Dalam konteks pembelajaran PAI, sikap moderat berarti menanamkan nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap keragaman mazhab dan budaya, serta kemampuan mengintegrasikan ajaran agama dengan realitas sosial..

2. Landasan Nilai Sikap Moderat

Landasan nilai sikap moderat dalam konteks pendidikan agama Islam terletak pada ajaran Islam yang menekankan prinsip keseimbangan (tawazun), keadilan ('adl), dan toleransi (tasamuh). Nilai ini berakar pada konsep wasathiyyah, yang dalam Al-Qur'an disebutkan dalam QS. Al-

Baqarah [2]:143 sebagai ummatan wasathan, yakni umat yang adil, seimbang, dan menjadi teladan bagi peradaban (Rahmah, 2021, hlm. 45). Dalam pendidikan, landasan nilai ini diterjemahkan ke dalam upaya membentuk siswa yang tidak ekstrem dalam beragama, mampu menghargai perbedaan, serta bersikap adil dalam mengambil keputusan.

Selain itu, moderasi beragama juga didukung oleh kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mendorong penerapan nilai-nilai toleransi dalam kurikulum. Hal ini sejalan dengan pandangan (Hidayati dkk.2023, hlm. 30) yang menegaskan bahwa pembentukan kultur moderat di sekolah dasar merupakan langkah preventif dalam mencegah berkembangnya sikap intoleran sejak dini. Dengan demikian, pendidikan moderat memiliki basis normatif dari ajaran agama sekaligus regulatif dari kebijakan pendidikan nasional.

Sikap moderat dengan demikian memiliki fondasi kokoh, baik dari sisi teologis maupun yuridis, yang memberikan legitimasi kuat bagi penerapannya dalam dunia pendidikan Islam..

3. Prinsip-Prinsip Sikap Moderat

Prinsip sikap moderat mencakup:

- a. Tawazun (Keseimbangan): menjaga harmoni antara hak individu dan kepentingan sosial.
- b. Tasamuh (Toleransi): menghargai perbedaan pandangan dan keyakinan.
- c. ‘Adalah (Keadilan): memperlakukan semua pihak secara proporsional.
- d. Syura (Musyawarah): menjunjung dialog dalam menyelesaikan persoalan (Wahyudin, 2023, hlm. 7).

Prinsip-prinsip ini menjadi pondasi penting dalam membangun generasi yang mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang multikultural.

4. Indikator Sikap Moderat

Indikator sikap moderat pada peserta didik dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti:

- a. Kemampuan menerima perbedaan pendapat.
- b. Perilaku inklusif dalam pergaulan sehari-hari.
- c. Kritis terhadap sikap ekstrem, baik liberal maupun konservatif.
- d. Mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan konflik (Hidayati et al., 2023, hlm. 30).

Dengan indikator ini, guru dapat menilai sejauh mana pembelajaran agama Islam mampu menumbuhkan sikap moderat pada siswa sekolah dasar.

5. Manfaat dan Tantangan Menumbuhkan Sikap Moderat

Menumbuhkan sikap moderat membawa manfaat yang signifikan, di antaranya terciptanya suasana belajar yang damai, tumbuhnya sikap toleransi, serta berkembangnya karakter bangsa yang inklusif. Hal ini juga dapat mencegah tumbuhnya sikap intoleran sejak dini (Dewi et al., 2024, hlm. 5).

Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Masih ada pengaruh lingkungan, media sosial, serta ideologi tertentu yang cenderung mendorong sikap eksklusif. Di sisi lain, keterbatasan guru dalam mengintegrasikan moderasi beragama dalam kurikulum juga menjadi kendala yang perlu diatasi (Khusaini & Inayati, 2022, hlm. 190).

6. Strategi Sikap Moderat

Strategi penanaman sikap moderat dapat dilakukan melalui:

- a. Integrasi dalam pembelajaran PAI: guru mengaitkan materi dengan nilai toleransi dan keberagaman.
- b. Pembiasaan dalam lingkungan sekolah: misalnya melalui kegiatan doa bersama, kerja kelompok lintas agama, dan program ekstrakurikuler.
- c. Keteladanan guru: guru berperan sebagai model yang menunjukkan sikap moderat dalam perkataan dan tindakan.
- d. Kolaborasi dengan orang tua: menumbuhkan budaya dialog dan keterbukaan sejak lingkungan keluarga (Wahyudin, 2023, hlm. 9).

Dengan strategi ini, pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam membentuk generasi yang berkarakter moderat, inklusif, dan mampu menjaga persatuan bangsa.

Dengan demikian, sikap moderat bukan sekadar wacana normatif, melainkan suatu kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pluralitas masyarakat. Pendidikan agama Islam di sekolah dasar menjadi medium penting dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi, baik melalui pembelajaran formal maupun pembiasaan dalam keseharian siswa.

C. KAJIAN TERDAHULU

Adapun sistem pendidikan sekolah dasar yang diterapkan di sekolah, kombinasi diantaranya: Kata kunci yang digunakan dalam penelitian adalah persamaan dalam proposal skripsi, artinya pengambilan dan pencantuman hasil dan penelitian dan karya ilmiah terdahulu dalam Proposal skripsi ini didasarkan hasil-hasil penelitiannya.

Berikut ini adalah isi secara garis besar dari hasil penelitian dan kajian ilmiah terdahulu yang memiliki persamaan:

1. (Sarindah, 2024) Dengan judul " Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar"

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar (SD).

Perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian yang lebih spesifik pada pembentukan sikap moderat, sedangkan penelitian lain memiliki fokus yang lebih luas pada implementasi Kurikulum Merdeka secara umum.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu Semua penelitian di atas berfokus pada implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI di tingkat SD..

2. (SIROTJUDDIN, 2024) Dengan judul "Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Smp Al-Anwar Rembang Tahun Ajaran 2"

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada Penelitian berfokus di SD Negeri Gudo, sedangkan penelitian lain dilakukan di lokasi atau tingkat kelas yang berbeda..

Semua penelitian menyoroti pentingnya Kurikulum Merdeka dalam menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna.

3. (Saniah dkk., 2024) Dengan Judul "Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Penggerak"

Persamaan Penelitian ini membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran PAI di sekolah dasar.

Pembentukan karakter siswa SDN 196 Sukarasa mulai dirasakan dalam perbaikan ibadah dan akhlak namun terus membutuhkan proses.

Perbedaan penelitian ini Terdapat penelitian yang berfokus pada manajemen implementasi moderasi beragama dalam kurikulum merdeka.